

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ANNISA
NPM : 1521020198**

Jurusan : Siyasah Syar'iyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I

:Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II

: Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai Peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.

Berdasarkan uraian di atas permasalahannya dapat dirumuskan: Pertama. bagaimanakah format wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang 1945.

Kedua. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wewenang tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian undang-undang sekaligus pandangan Hukum Islam terhadap Kewenangan Lembaga Mahkamah Konstitusi, dan untuk menemukan sesuatu ilmu yang baru yang dapat menambah pengetahuan bagi penulis. Kegunaan penelitian ini adalah dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara dalam Islam, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam di masa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, naskah, catatan, dan dokumen. Metode pengolahan data adalah editing, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Metode analisa data bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan pendekatan yang bersifat induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu proses di dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi sehingga setiap putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya.

Kedua. Menurut pandangan hukum Islam bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam tetapi keberadaanya di bolehkan atas dasar prinsip: a. Mashlahah mursalah, b. Qaidah ushul. Maka diperbolehkan dan dapat di terima Mahkamah Konstitusi di berikan wewenang untuk melakukan pengujian terhadap UUD 1945 yang secara tegas telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Nama : ANNISA
NPM : 1521020198
Jurusan : Siyasah Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : "KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.1962102199930311002

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP.195812071987031003

Ketua Jurusan Siyasah Syar' iyyah

Dr. Nurnazli, S.H., Sag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** disusun oleh Nama: **ANNISA NPM: 1521020198, Program Studi : Siyasa Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H (.....)

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr.H. Khairuddin, M.H.I (.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



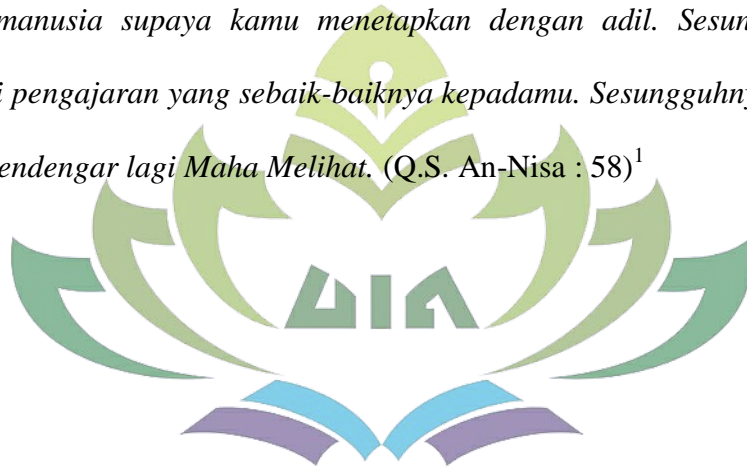
Dr. H. Khairuddin, M.H.
152102199930311002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa : 58)*¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 1976, h.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ali Umar dan ibuku Syahdiah (papa & mama) yang amat kusayangi dan aku banggakan, yang tak pernah henti mendo'akan disetiap sujudnya, yang selalu bekerja keras, mendidik dan membesarkan dengan penuh kesabaran, cinta kasih dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti untuk masa depan dan kesuksesanku. Aku sangat menyayangi kalian.
2. Keluargaku tercinta Wak ku (Bapak & Ibu), Yai, Nyai yang sangat menyayangiku dari kecil hingga sebesar ini, selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan cinta kasih sayang yang tiada putus hingga kini. Aku sangat menyayangi kalian.
3. Kakakku M.Irham,S.A.B dan adik perempuanku Rika Tri Ana Tercinta, kalian selalu menjadi kebanggaanku dan menjadi penyemangatku dalam proses membuat skripsi ini.

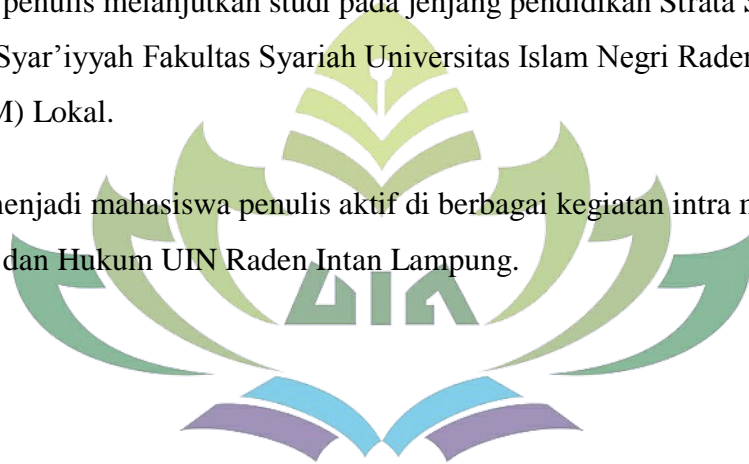
RIWAYAT HIDUP

ANNISA, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 januari 1997, berkat ridho Allah SWT sebagai putri kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ali Umar dan Ibu Syahdiah.

Penulis menjalani pendidikan di usia dini di TK KARTINI 1 Tanjung Karang Bandar Lampung pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SD pada tahun 2003 di SDN 2 PALAPA Tanjung Karang Bandar Lampung, dan melanjutkan pendidikan di SMP NEGRI 18 Bandar Lampung pada tahun 2009 yang diselesaikan pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA YP UNILA Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur (UM) Lokal.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 7 Oktober 2019

Yang membuat,

ANNISA

1521020198

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam”.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terima kasih banyak dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawan nya.

2. Dr. H. Khairuddin,. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. sekaligus pembimbing I dan Drs. Henry Iwansyah, M.A. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Dr. Nurnazli, S.H., SAg., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
6. Untuk Sahabat Setiaku Nur Rahma Diyani yang sudah aku anggap sebagai saudaraku sendiri, yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini, yang saling mensupport, suka, duka, canda ,tawa bersama. Thank Beb atas kebersamaannya.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2015, arifah fadhilah, rahmatang, rizky amelia, mayang, gilang ramadhan, arif fajar nugroho, elisa, tri setiawan, mba fikti dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, dalam berjuang bersama untuk menuju kesuksesan.

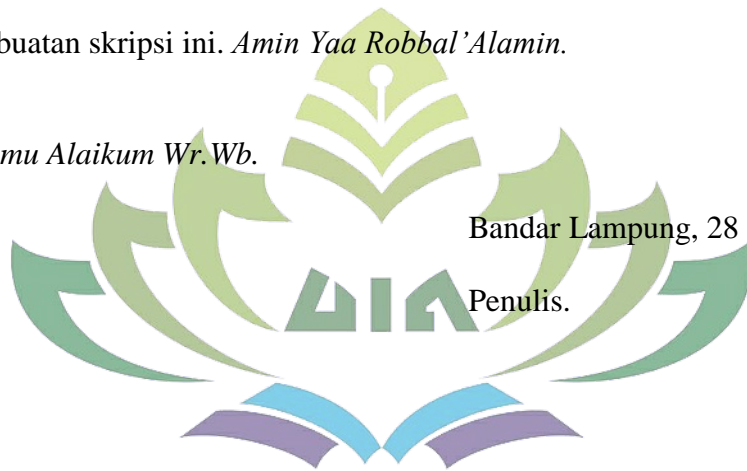
8. Sahabat SMA'ku yang sudah memberikan aku semangat dan suportnya Indi asti sandini, Maya Melsa, & Anggun thank guys untuk kesetiaan kalian terhadapku.
9. teman-teman seperjuangan KKN kelompok 121 dan teman-teman seperjuangan PPS semoga kesuksesan akan selalu kebersamai kita semua.
10. Yang Kubanggakan Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. *Amin Yaa Robbal'Alamin.*

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2019

Penulis.



ANNISA

1521020198

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian.....	11

BAB II KEKUASAN LEMBAGA PERADILAN DALAM ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Wewenang Lembaga Peradilan...15	
B. Macam-Macam Lembaga Peradilan Dalam Islam	24
C. Peran Dan Fungsi Lembaga Peradilan Dalam Islam	32

BAB III PRIHAL KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI.....

A. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi	36
B. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi.....	43
C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam sistem peradilan nasional.	47

BAB IV LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UUD DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Lembaga Mahkamah Konstitusi	70
B. Wewenangan Kelembagaan	72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam”** untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.¹

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan peran MK penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan.²

Pengujian (*toetsing/review*) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian Undang-Undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja

¹H. Salim dan Nurbaidi ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h 183

²Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 19

melainkan juga lembaga legislatif/ eksekutif. Berdasarkan pengertian dari kamus *black* dan *fockema* pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (hakim) bukan dilakukan oleh lembaga eksekutif ataupun legislatif. Oleh karena itu disebut *judicial review*.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.⁴

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁵

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa

³Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010), h. 1-2

⁴Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar), h 142

⁵Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), h.

oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang ketentuan UUD 1945 yang secara tegas telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis yang mendorong untuk memilih judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Dikeluarkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilatar belakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan kewenangan konstitusional.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undnag-undang terhadap UUD 1945 presfektif hukum islam. .
- b. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, selain itu penulisan ini didukung dengan berbagai

⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah". *Jurnal Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (2017), h. 24.

literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan dan sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C jo pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945.

Ada pendapat yang berkembang bahwa, kewenangan Mahkamah Agung berkaitan dengan Hak Uji Materil dibiarkan tetap seperti sekarang, dan jika terjadi persoalan di sekitar undang-undang atau konstitusi, maka untuk menanggulangi dan menyelesaikan diserahkan kepada institusi yang kini populer dengan nama Mahkamah Konstitusi, dan ternyata melalui amandemen ketiga Mahkamah Konstitusi ini telah dimasukkan ke dalam UUD 1945.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak dapat dielakkan lagi karena sudah menjadi kenyataan telah tertuang di dalam Undang-undang Dasar. Lain halnya jika kehadiran Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Agung di dalam hal fungsi pengujian hukum dimana fungsi ini kemudian dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bagian tak terpisahkan dengan Mahkamah Agung dan kehadirannya adalah

memperluas posisi Mahkamah Agung yakni tidak lagi sekedar sebagai Pengadilan Negara Tertinggi tetapi juga sebagai Mahkamah Konstitusi. Maksudnya adalah Mahkamah yang berwewenang menguji apakah peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lain dari pemerintah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Jika sebelumnya terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, maka sekarang kedudukan lembaga-lembaga tersebut menjadi sejajar dan dinamakan sebagai lembaga negara, Lembaga negara yang dimaksud yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam melaksanakan tugasnya lembaga-lembaga negara tersebut saling menghargai dan menghormati kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing.

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan perundang-undangan lainnya.⁷

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke II, 2011), h 29.

Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen right*) maupun hak-hak yang tergolong kedalam hak asasi manusia (*human rights*).⁸ Hak konstituional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi dan dijamin oleh warga Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-

⁸. I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 39

sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.⁹

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang dari pemohon beralasan maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan (pasal 56 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003). Sedangkan bila tidak beralasan maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003). Terhadap permohonan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu Undang-Undang, baik karena pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun mengenai materi ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang (pasal 51 jo pasal 56 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003).¹⁰

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/ interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi

⁹Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay,..... h 31

¹⁰.Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay,..... h 31

Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.¹¹

Peradilan adalah terjemah dari Bahasa Arab *القضاء* sendiri memiliki beberapa arti, yaitu memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi dan juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi.¹² Adapula yang mengatakan bahwa *Al Qadha* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah. Atau secara ringkas, menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan menggunakan hukum Allah.¹³

Peradilan atau *qadla* hukumnya *fardlu kifayah* dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan tidak ada *qadli* atau penguasa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara *tahkim* pada seorang *muhakkam* yakni menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum, seperti tahkim seorang wanita kepada seseorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkaranya. Dalam suatu kelompok masyarakat yang sudah teratur, jabatan hakim atau *qadli* dapat dilakukan secara pemilihan dan *bai'at* oleh *ahlul halli wal 'aqdi* yakni pengangkatan atas seseorang yang dipercaya oleh

¹¹*Ibid.*

¹²Muhammad Salama Madkur, *Al Qadhau Fi Al Islam*, Diterjemahkan oleh Imran A.M dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. IV, 1988), h 20

¹³*Ibid.*

majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Sedang dalam suatu negara yang berpemerintahan, susunan jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberian *tauliyah* yakni pemberian kekuasaan dari penguasa.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian ia mengandung makna proses, yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu, yang dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah SWT.

Allah SWT. berfirman pada QS. al Nisa': 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا
Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahy ukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa(4): 105).*

Berpijak dari ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan) dengan fakta yang kongkrit dan meyakinkan sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk adaptip dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan zaman.

¹⁴H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 29-30

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang, sebagaimana diamanatkan Oleh Undang-Undang 1945?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap wewenang Tersebut?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui secara jelas kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam pengujian undang-undang sekaligus pandangan hukum Islam terhadap kewenangan lembaga Mahkamah Kontitusi.

- b. Tujuan Subjektif

Untuk menemukan sesuatu ilmu yang baru yang dapat menambah pengetahuan bagi penulis. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) jurusan Siyasa pada UIN Raden Intan Lampung.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam di masa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Penelitian ini sebagai bahan bacaan bagi peneliti ilmu hukum atau pembaca pada umumnya, sehingga dapat diambil langsung manfaatnya. Terutama yang berhubungan dengan konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk itu agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, serta mendapatkan hasil yang maksimal maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang di angkat.¹⁵ Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari

¹⁵. M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 57

pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum, pendekatan teori hukum, dan pendekatan konstitusional. Pendekatan filsafat hukum dimaksudkan untuk mengetahui dasar filosofis adanya pengujian peraturan perundang-undangan, pendekatan teoritis digunakan untuk mengetahui berbagai teori yang dapat dijadikan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang dan berbagai persyaratan teoritis yang harus dijadikan pedoman pengujian.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara komperhensif untuk kemudian di analisa secara logis, sehingga mendapat kesimpulan apa yang di teliti.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁷

¹⁶. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

¹⁷. Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h 9

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *merecover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub pembahasan. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas di gunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

2) Rekontruksi data (*recontrukting*)

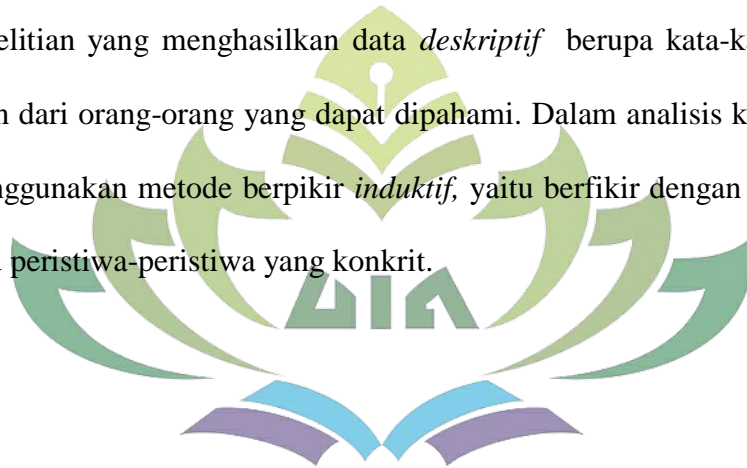
Rekontruksi data (*recontrukting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan interprestasikan.

3) *Sistemizing* atau sistematisasi

Sistemizing atau sistematisasi Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Dan data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klafikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit.



BAB II

KEKUASAN LEMBAGA PERADILAN DALAM ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Wewenang Lembaga Peradilan

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan Syari'at Allah yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termasuk dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari'at Ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan. idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.¹⁸

Era mekanisasi dan modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian dan perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar sederhana. Eksistensi syari'at Islam yang konsisten pada prinsip dan asasnya tidaklah harus statis, tetapi justru harus fleksibel dan dapat mereduksi perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, Maktabah Wahbah, Kairo, 199, h. 151

Sebagaimana dibahasakan Hasan Bisri hal tersebut merupakan kegiatan reaktualisasi Islam, dimana secara garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan me-reinterpretasi sumber hukum Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasai, dan kondisi dewasa ini.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka orang Islam (khususnya para alim ulama Islam Umum seluruh umat Islam) dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap khazanah hukum Islam secara inovatif melalui media ijtihad. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh dan yang namanya fiqh itu senantiasa fleksibel dan perkembangannya berbanding lurus dengan kehidupan dan kebutuhan manusia.

Namun dengan adanya fleksibilitas dalam syari'at Islam dan tuntutan bahwa hukum Islam harus senantiasa *up to date* dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan umat bukan berarti atau dimaksudkan ajaran Islam, terutama fiqh (hukum) nya tidak konsisten, mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia. sehingga hukum Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat mengese Al-Qur'an dan Sunnah hanya untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Gaya Media Pratama*, Jakarta, 1997, h. 7

1. Prinsip Keadilan

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.²⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Qs. Anisa:58)

Ketegasan perintah untuk berbuat adil itu menjadikan peran hakim (qadhi) berada pada posisi yang penting dan strategis. Mereka merupakan orang yang merefleksikan aturan-aturan Allah untuk tegaknya keadilan. Seorang hakim yang memutus suatu sengketa (perkara) dengan adil, maka berarti dia telah membuka peluang

²⁰ Aunur Rohim Faqih, *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 3, No. 1, 2013, h. 227

bangsanya untuk menjadi besar dan kuat. Di akhirat dia juga akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga yang penuh kenikmatan.

2. Prinsip transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (Qs. Al Isra: 36)

3. Prinsip Partisipasi

Prinsip ini adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَآتَفَضُوا مِنْ^ط
 حَوْلِكَ^ط فَأَعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ^ط
 عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu²¹. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²²

Dari ayat di atas kita mendapatkan nilai dasar tentang penyelenggaraan Pemerintah Mahkamah Konstitusi yang berpartisipasi dalam pengawasan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam Pengujian Undang-Undang Dasar 1945.

4. Prinsip penegakan hukum

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, mendesak diadakan suatu pengaturan hukum untuk menata dan mengendalikan aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan pula ketajaman visi bagi penentu dalam kebijakan politik (*decision maker*) dalam merancang dan membentuk politik yang sesuai budaya hukum masyarakat.²³

²¹ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

²³ Tri Handayani, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, Cet.I, 1996), h.94.

Dambaan atas penegakan dalam makna supremasi hukum bukan sesuatu yang begitu gampang, karena supremasi hukum tidak mungkin tercapai hanya dengan Undang-Undang belaka, tetapi harus diperhatikan fenomena-fenomena hukum Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk action telah diatur dalam fiqh, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad.

5. Prinsip Kebaikan Masyarakat (Maslahah Mursalah)

Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat-menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya.

Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk Maslahah tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *sâlih participle* aktif atau *fâ'il* dari kata *salaha*. Misalnya firman Allah dalam surat Âli 'Imrân [3] ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وُسْرَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh. (Qs. Ali Imron :114)²⁴

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."²⁵

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh *nash* yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash*. Kemaslahatan yang pertama disebut

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 1976, h. 145

²⁵ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

sebagai al- maslahah al-garibah (kemaslahatan yang asing),namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.²⁶

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan maslahah. Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti " berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.²⁷

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek Maslahat secara langsung Maslahah Mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu

²⁶ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984), h. 1109.

²⁷ *Ibid*

kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya

Maslahah Mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini menjapakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.²⁸

Maslahah Mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh Syari at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat *syara'* (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan

²⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)* (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000), h. 33.

macam-macam Maslahat, sehingga Maslahat seperti ini disebut dengan Mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas.²⁹

B. Macam-Macam Lembaga Peradilan Dalam Islam

1. Wilâyah Al-Qadhâ

Wilayah al-qadha adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.

Kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim atau non-muslim.

Menurut al-Mâwardî, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang qâdhî yaitu laki-laki, berakal dan memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah.

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah:

- 1) Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa.
- 2) Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberikan sanksi kepada yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah.
- 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak, atau idiot.

²⁹ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 63. (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (23 Maret 2019, pukul 20:30 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

- 4) Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.
- 5) Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah.
- 6) Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah.
- 7) Melaksanakan hukuman bagi para terhukum.
- 8) Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka.
- 9) Meneliti para saksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya.
- 10) Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan, maupun rakyat biasa.³⁰

2. Wilayah al-mazhalim

Kata *wilayah al-mazhalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan al-mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah bentuk jamak dari mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman.³¹

Secara terminologi *wilayah al-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.

³⁰ Mumamad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 183

³¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 113

Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, para hakim, maupun anak-anak orang yang berkuasa. Al-Mâwardi menjelaskan bahwa tugas dan Wewenang lembaga ini adalah:

- 1) Penganiayaan para penguasa baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
- 2) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lainnya.
- 3) Mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat
- 4) Pengaduan yang diajukan oleh Tentara karena gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya
- 5) Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim
- 6) Memperhatikan harta-harta wakaf.

7) Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, karena yang dijatuhkan hukumannya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.

8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh muhtasib.

9) Memelihara hak-hak Allah yaitu ibadah-ibadah seperti salat Jumat, 'Id, haji, dan jihad.

10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Mazhalim* sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM.³² Artinya segala Masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman.

Penguasa atau pejabat Negara sangat memungkinkan menyalahgunakan kekuasaannya melalui Kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki ini termasuk dalam pembuatan kebijakan ataupun pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sangat

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 159

mungkin kebijakan dan peraturan Perundang-Undangan yang dibuat mengandung unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.

Sehingga dibutuhkan lembaga yang juga memiliki kekuatan yang seimbang dengan penguasa atau pejabat Negara untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat Negara melalui Kewenangannya. Hal demikian dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak rakyat yang seharusnya mereka dapatkan.

Melihat kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh *Wilayah al-Mazhalim* diantaranya:

- (1) memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan dan
- (2) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini didesain untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap perorangan maupun golongan, juga sebagai lembaga yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap para penguasa atau pejabat Negara.

3. Wilayah al-Hisbah

Hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah. Hakim lembaga ini disebut *muhtasib* yang bertugas mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang ketertiban umum dan adab-adab kesusilaan yang

tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Muhtasib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) adil, (2) merdeka, (3) memiliki pandangan atau berwawasan luas serta tajam pemikirannya, (4) teguh dalam pendirian agama, dan (5) memiliki pengetahuan tentang tindakan-tindakan kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat.³³

Dari beberapa persyaratan tersebut, menurut *Ibn Taymiyyah*, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai persyaratan yang terpenting. Dengan demikian orang yang diangkat menjadi muhtasib haruslah orang yang memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial.

Tugas dan Wewenang muhtasib adalah menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar, membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum, mencegah penduduk membangun rumah-rumah yang menyebabkan penyempitan jalan, mengawasi penipuan dalam takaran, ukuran, dan timbangan di pasar, dan melarang para buruh agar tidak berlebihan muatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia.³⁴

Menurut *Ibn Taymiyyah*, muhtasib bertugas melaksanakan amar ma'rûf nahî munkar yang bukan merupakan Wewenang para penyelenggara Negara, Hakim, anggota dewan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa hisbah merupakan lembaga penegak hukum yang

³³ Hasan Mu'arif Ambary, "Muhtasib", *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 61.

³⁴ Hilmî, Nizhâm, h. 362-363. Lihat juga, *Shabir Ta'imah, Dirâsât fî al-Nizhâm al-Islâmiyyah*, h. 51

bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan Wewenang tersendiri di luar Wewenang qadha, mazhâlim, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam.

Pertama, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan salat lima waktu, Jumat, dan pemeliharaan masjid.

Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar.

Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, seperti memelihara kondisi jembatan, kebersihan jalan raya, mengadakan ronda, dan tindakan preventif terhadap pelbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab tersebut secara garis besar dapat dikatakan berada dalam bingkai pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku secara baik dalam masyarakat.

Oleh karena itu, secara teknis pelaksanaan tugas muhtasib dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

Pertama, berinisiatif melakukan investigasi dalam bidang perdagangan atau bereaksi terhadap tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh masyarakat.

Kedua, memiliki kekuatan pasukan, namun dalam mengambil tindakan diutamakan menggunakan cara persuasi, seperti menempuh prosedur peringatan keras sampai melakukan pengusiran terhadap seseorang dari suatu daerah. Tindakan keras dilakukan apabila tindakan persuasi tidak efektif untuk mengatasi permasalahan atau kecurangan yang terjadi.

Ketiga, kode etik yang berlaku mengacu pada sikap seseorang mesti diukur terlebih dahulu menurut ketentuan syarak sebelum muhtasib melakukan intervensi. Selanjutnya, muhtasib tidak boleh mengambil kebijakan berdasarkan ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang semestinya berdasarkan kesepakatan ulama.³⁵

Dari ketiga langkah tersebut dapat dinyatakan di sini bahwa muhtasib memiliki Kewenangan yang besar dalam menegakkan moral dan hukum yang berlaku, namun ia harus menggunakannya dengan hati-hati. Hukuman dapat saja diterapkan oleh *muhtasib* dengan mempertimbangkan kadar kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk hukuman dapat berupa saran, teguran, kecaman, ancaman, penjara, sampai pengusiran dari kota.³⁶

³⁵ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fî al-Islâm*, h.12-20

³⁶ Badawî Thabânah, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn li al-Imâm al-Ghazâlî*, h. 324

Fungsi utama muhtasib adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan syariah. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan. Ini berarti bahwa sebelum muhtasib menghentikan atau menghukum suatu pelanggaran ia harus membuat rencana yang matang untuk mengantisipasi reaksi balik yang ditimbulkan

Dengan melihat Wewenang lembaga hisbah, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga ini sangat luas, sebab hal-hal yang menyangkut sarana dan prasarana kesejahteraan umat menjadi tanggung jawabnya. Tugas lembaga ini semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan problem yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan umat itu sendiri. Selain itu, lembaga hisbah juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah agar umat Islam melaksanakan *amar ma'rûf dan nahî munkar*.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga ini bukan merupakan lembaga tradisi tetapi lebih merupakan lembaga keagamaan yang masuk dalam lingkup sistem peradilan Islam yang bertugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar, tetapi lebih dari itu menyangkut penyebaran hukum, penegakan hukum dan norma-norma sosial.

Dengan kata lain, tugas muhtasib adalah berhubungan dengan amar ma‘rûf nahî munkar yang tidak termasuk masalah-masalah hudud, qishash, diyat, dan al-ahwal al-syakhshiyyah yang telah diatur ketentuannya oleh nas. Muhtasib hanya berwenang menangani perkara-perkara yang bersifat pelanggaran ringan. Kewenangannya adalah menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang telah terjadi. Artinya, ketika terjadi suatu pelanggaran maka muhtasib langsung bertindak.

C. Peran Dan Fungsi Lembaga Peradilan Dalam Islam

Tujuan awal pembentukan kekuasaan (sultah) dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga tak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan Kewenangannya untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itulah lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa, dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik.

Merujuk kepada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh siyasah, yakni ada sebuah kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini pada dasarnya meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan antara seorang pemimpin dengan

rakyat yang dipimpinnya. Jika ditarik lebih jauh, pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁷

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain. Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan.

Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.³⁸

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Peran Negara Dalam Hisbah*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012, h. 121

³⁸ Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Jurnal Rechts Viding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, h. 70

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. Annisa:58)

Peran dan fungsi mk dalam lembaga peradilan mahkamah ini dapat berfungsi memutuskan perselisihan dalam kehidupan demokrasi Negara modern. hal ini sebagaimana tertuang dalam ayat di atas.

Sebagai lembaga Negara yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut di atas, peradilan Islam mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Menetapkan sangsi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
3. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar.
4. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat.
5. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam.

Syariat Islam yang diperjelas dengan fikih sudah mengatur permasalahan hukum yang cukup detail. Aturan-aturan ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun, karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.³⁹

Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum.

Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'amalah. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara Negara.

³⁹ Marzuki, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, h.10

BAB III

PERIHAL KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.⁴⁰

Seiring dengan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya proses politik hukum yang sangat panjang dengan melalui sebuah proses amandemen konstitusi (UUD 1945), dimana menurut A. Mukhtie Fadjar perubahan paradigma tersebut ialah : dari paradigme Negara ke paradigme masyarakat dengan semangat penguatan *civil society*. dari paradigme integralistik ke paradigme kedaulatan rakyat/demokrasi dengan semangat penghormatan HAM.

Dari paradigme Negara kekuasaan (*machtstaat*) ke paradigme Negara hukum (*rechstaat*) dengan semangat supremasi hukum, yang adil

⁴⁰<https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> (Diakses, 6 Agustus 2019, PKL17.07 WIB)

dan responsif. Salah satu dari sekian perubahan paradigma di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dianut dalam UUD 1945 pasca amandemen ialah tidak ditematkannya lagi MPR pada posisi yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga Negara lainnya. MPR ditempatkan pada posisi lembaga tinggi Negara yang kedudukannya sejajar dengan semua lembaga tinggi lainnya, tak terkecuali Mahkamah Konstitusi.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.⁴¹ DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman

⁴¹Bambang Sutiyo, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, (Desember 2010), h. 27-28.

menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁴²

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.⁴³

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah :

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴²*Ibid*, h.28-29

⁴³*Ibid*, h.29

Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Selain hal tersebut di atas, gagasan penguatan checks and balances di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan faktor lahirnya Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan.⁴⁴

⁴⁴Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 73 - 74.

Kekuasaan Negara pada umumnya di klasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan Yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau Ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem Ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum Ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian Kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga Negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan Konstitusi, serta prinsip-prinsip Konstitusionalisme dan Negara Hukum dalam suatu Konstitusi.⁴⁵

Sementara itu, Kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah Kewenangan yang memang diberikan dalam rangka menjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung hak asasi

⁴⁵Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 26

manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak Konstitusional warga (*the prtector of the citizen's constitutional rights*).

Perpu adalah produk hukum yang menjadi Kewenangan Presiden untuk membentuknya. Secara eksplisit belum ada peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan Kewenangan melakukan *judicial review* Perpu.

Dalam rangka menjaga Konstitusi, hak-hak warga Negara, dan hak asasi manusia, tidak seharusnya terdapat peraturan Perundang-Undangan yang tidak dapat diuji secara yudisial. Karena peraturan perundang-undangan adalah produk penguasa pembuat Undang-Undang, dan syarat dengan muatan politik. Sehingga ada kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa tersebut melanggar Konstitusi, hak-hak rakyat, maupun hak asasi manusia. Sehingga sepatutnya segala peraturan perundang-undangan harus tetap diawasi oleh kekuasaan diluar kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan. Kontrol ini juga sebagai bentuk kontrol terhadap pejabat negara dengan kewenangannya.

Sejalan dengan lembaga peradilan yang akan menangani perkara pelanggaran/kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, dan melakukan kontrol/pengawasan terhadap pejabat negara. Diharapkan tidak ada pelanggaran/kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, termasuk melalui kebijakan politik atau peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Mahkamah Konstitusi pun demikian, Kewenangan *judicial review*(menguji undang-undang) yang diberikan adalah sebagai

bentuk penjagaan terhadap konstitusi, hak-hak warga negara, dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tidak seharusnya dibiarkan adanya kebijakan atau peraturan Perundang-Undangan yang mengikat warga Negara sebagai produk yang dihasilkan oleh penguasa Negara kemudian tidak dapat diuji/diawasi. Karena sangat mungkin Kewenangan membuat Peraturan Perundang-Undangan akan terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi, hak-hak warga negara, dan hak asasi manusia melalui produk peraturan perundang-undangan yang dibuat. Oleh karena itu sepatutnya Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji/melakukan *judicial review* Perpu terhadap UUD NRI 1945.⁴⁶

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:⁴⁷

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

⁴⁶Bambang Sutiyoso,.....h. 28-29

⁴⁷Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, h.264

2. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di samping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

B. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Para Hakim.
2. Sekretariat Jenderal, dan
3. Kepaniteraan.

Organisasi Pertama adalah para hakim konstitusi yang terdiri atas 9 (sembilan) orang sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi negarawan yang menguasai konstitusi ditambah dengan syarat-syarat kualitatif lainnya. dengan masa pengabdian untuk lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode lima tahun berikut.

Dari hakim itu dipilih dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, masing-masing untuk masa jabatan 3 tahun. Untuk menjamin independensi dan imparsialitas kerjanya, kesembilan hakim itu ditentukan oleh tiga lembaga yang berbeda, yaitu 3 orang dipilih oleh DPR, 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang lainnya ditentukan oleh Presiden. Setelah terpilih, kesembilan orang tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden. Mekanisme rekrutmen yang demikian itu dimaksudkan untuk menjamin agar kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi itu benar-benar tidak terikat hanya kepada salah satu lembaga Presiden, DPR ataupun MA. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi diharapkan benar-benar dapat bersifat independen dan imparsial.

Kesembilan orang hakim itu bahkan dapat dipandang sebagai sembilan institusi yang berdiri sendiri secara otonom mencerminkan 9 pilar atau 9 pintu kebenaran dan keadilan. Dalam bekerja, kesembilan orang itu bahkan diharapkan dapat mencerminkan atau mewakili ragam pandangan masyarakat luas akan rasa keadilan. Jika dalam masyarakat terdapat 9 aliran pemikiran tentang keadilan, maka kesembilan orang hakim konstitusi itu hendaklah mencerminkan kesembilan aliran pemikiran tersebut. Keadilan dan kebenaran konstitusional justru terletak dalam proses perdebatan dan bahkan pertarungan kepentingan untuk mencapai putusan akhir yang akan dijatuhkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, persidangan Mahkamah Konstitusi selalu harus dihadiri 9 orang dengan pengecualian jika ada yang berhalangan, maka jumlah hakim yang bersidang dipersyaratkan

sekurang-kurangnya 7 orang. Karena itu pula, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengenal satu majelis hakim, tidak seperti di Mahkamah Agung.

Organisasi Kedua adalah sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi yang menurut ketentuan UU No. 24 Tahun 2003⁴⁸ dipisahkan dari organisasi kepaniteraan. Pasal 7 UU ini menyatakan: “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan”. Penjelasan pasal ini menegaskan: “Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif.

Organisasi Ketiga yaitu kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial”. Perbedaan dan pemisahan ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi peradilan atau administrasi justisial di bawah kepaniteraan tidak tercampur-aduk dengan administrasi non-justisial yang menjadi tanggungjawab sekretariat jenderal. Baik sekretariat jenderal maupun kepaniteraan masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, Sekretaris Jenderal dan Panitera sama-sama mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Eselon 1a. Panitera dan Panitera Pengganti memang merupakan jabatan fungsional, bukan struktural. Akan tetapi, khusus untuk Panitera diangkat dengan Keputusan Presiden dan karena itu disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon 1a. Untuk menjamin kemandirian Mahkamah Konstitusi di

⁴⁸LNRI Tahun 2003 No. 98 dan Tambahan LNRI No.4316.

bidang finansial, maka UU No.24/2003 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai mata anggaran tersendiri dalam APBN⁴⁹.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau biasa dikenal dengan istilah *Judicial Review* (pengujian yudisial atau hak uji materil) berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD untuk dapat diuji secara yudisial dan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau Inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi sendiri sejak tahun 2003-2013 telah menguji 7 (tujuh) perkara pengujian perpu terhadap Undang-Undang Dasar, yakni pengujian Perpu nomor 4 tahun 2009, Perpu nomor 4 tahun 2008 dan Perpu nomor 1 tahun 2013. Pengujian perkara dengan nomor putusan 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian menjadi yurisprudensi Hakim Konstitusi dalam memutus suatu perkara pengujian perpu.

⁴⁹*Ibid.*, Pasal 9 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Nasional

Menurut Harjono, antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, keduanya merupakan lembaga tinggi Negara yang terpisah, tetapi memiliki hubungan yang bersifat horizontal fungsional. Artinya, kedua lembaga tersebut tidak saling mensubordinasikan, tetapi masing-masing mempunyai kompetensi secara mandiri. Akan tetapi walaupun keduanya memiliki kompetensi dan Kewenangan yang berbeda, masing-masing tetap dalam fungsi besarnya, yaitu sebagai lembaga tinggi Negara yang memiliki kekuasaan kehakiman atau *judicial power*.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif (Presiden), maka Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial of power*) yang lahir dari ketidakadilan dan pelanggaran konstitusi (UUD 1945) merupakan lembaga mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun, meskipun keanggotaan dari 9 (*Sembilan*) hakim konstitusi berasal dari 3 orang hakim yang dipilih oleh Presiden, di mana tugas, wewenang struktur dalam hukum acaranya diatur dalam UUD yang notabene disahkan oleh Presiden. Meskipun demikian tidak berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi subordinasi dari kedudukan Presiden, melainkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan

kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegaskan hukum dan keadilan dalam lingkup Wewenang yang dimiliki.

Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi selain Mahkamah Agung, tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ke arah yang positif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan yang mengadili dalam urusan bernegara dan termasuk bagian dari lembaga yudikatif yang berdiri sendiri. Montesquieu memperkenalkan hal tersebut dengan sebutan trias politica.⁵⁰

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai “salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵¹ Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Pasal 3 UU

⁵⁰ Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.85

⁵¹ UU Mahkamah Konstitusi.,

Mahkamah Konstitusi). Menurut Jimly Asshiddiqie,⁵² kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di Negara--negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Konstitusional modern. Mahkamah Kosntitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dan dilatar belakangi pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara

⁵²Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003), h. 23

hukum dan demokrasi , perlindungan hak asasi manusia , serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dan dilatar belakangi pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi , perlindungan hak asasi manusia , serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi di sebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara Ketatanegaraan atau perkara Konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan.⁵³ Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang merdeka dan mandiri dengan tugas menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Di mana untuk melihat pencapaian tujuan dari kedua lembaga kehakiman tersebut (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) adalah bagaimana kedua lembaga itu bekerja berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya untuk terpenuhinya penegakkan hukum dan keadilan.⁵⁴

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstiusionalitas undang-undang nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ini menurut Pasal 7B dan Pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 melainkan meliputi⁵⁵ :

1. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945

Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini, khususnya sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*)

⁵³Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 62

⁵⁴*Ibid.*, h. 74-75

⁵⁵Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009), h. 262

merupakan suatu hal yang lazim yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, pengujian peraturan.

perundang-undangan telah diperkenalkan sejak tahun 1970, yakni melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana kewenangannya diletakkan pada Mahkamah Agung (MA) dengan kekuasaan dan kewenangan yang terbatas.

Dalam pengujian undang-undang (*judicial review*), Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua jenis *judicial review* yaitu: (1) *concreate norm review* dan (2) *abstract norm review*. Selanjutnya berdasarkan objek yang diuji, pengujian produk hukum secara umum (*toetsingrecht*) yaitu (a) *formele toetsingrecht* dan *materiele toetsingrecht* sehingga dalam *judicial review* terdapat pula jenis formal *judicial review* dan materiil *judicial review*.⁵⁶

Terhadap hak menguji materiil, Sri Soemantri memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sementara hak menguji formal menurut Sri Soemantri adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang misalnya terbentuk

⁵⁶ Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 75

melalui cara-cara (prosedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi dalam bahasa yang ringkas, review terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan

Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁵⁷

Pengujian Undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan pengujian undang-undang baik materil maupun formil atas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah kewenangan menguji baik secara materiil maupun formil peraturan perundang-undangan di bawah UU berada pada Mahkamah Agung. Pengujian Undang-undang secara materiil adalah pengujian materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang terhadap UUD. Pengujian ini untuk membuktikan apakah materi dalam suatu undang-

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Melembagakan Mahkamah Konstitusi di Negara Demokrasi Baru, bahan untuk ceramah Australia*, Jakarta, h. 1.

undang baik berupa ayat, pasal atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan materi UUD.

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas. setelah mahkamah agung Amerika Serikat di bawah pimpinan John Marshall memeriksa dan memutuskan perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusan tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya. Meskipun Konstitusi tidak mengatur hal tersebut, mahkamah agung Amerika menganggap hal itu adalah tugas pokok mahkamah agung yang ditafsirkan dari konstitusi, dengan mana kemudian berkembang pengertian bahwa mahkamah agung merupakan pengawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.⁵⁸ Sejak putusan tersebut, lembaga judicial review menyebar ke seluruh dunia dan dipandang sebagai fungsi dan tugas mahkamah untuk menjaga, mengawal, dan melindungi konstitusi.

⁵⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta : Konstitusi Pers, Cet. I, 2005), h.23

2. Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas mempunyai batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD Tahun 1945, sehingga meskipun terjadi multi tafsir, dalam dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung wewenangannya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangannya diatur dan diturunkan dari Undang-undang Dasar 1945. Penegasan ini dapat menjawab keraguan banyak orang karena banyak organ yang dibentuk akhir-akhir ini juga disebut sebagai lembaga negara, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Demikian pula dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang disebut dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), begitu pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta dalam Undang- undang Pemilu.

Mahkamah agung adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari Undang-undang Dasar 1945, tetapi secara tegas Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa Kewenangan di depan

Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian belum jelas apakah Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mencakup pembebasan dari kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (34) bahwa lembaga negara diminta untuk memberikan keterangan secara tertulis atau penjelasan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permohonan yang wajib diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

Satu-satunya perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari Undang-undang Dasar 1945 yang diperiksa dan diputus mahkamah konstitusi sampai saat ini adalah sengketa kewenangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau disebut juga dengan DPD.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

sistem demokrasi pada masa sekarang lazim diterapkan di negara-negara di dunia dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi ini berkaitan erat dengan asas kedaulatan rakyat yang menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara dimiliki dan dilaksanakan oleh rakyat.² Begitu pula dalam demokrasi, dimana pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil-wakil rakyat) yang berada pada lembaga perwakilan rakyat.⁵⁹

Jadi keberadaan demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara dapat ditunjukkan dengan keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers*, Jakarta, hal. 414 3 Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakanke-V, Liberty, Yogyakarta, h. 27

negara tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUDNRI 1945. Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik. Bahkan keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dikemukakan Schattscheider dengan menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh partai politik.

Isu hukum mengenai Pembubaran Partai Politik dewasa ini masih menimbulkan polemik karena keberadaan partai politik di negara yang bersistem politik demokrasi, dianggap merupakan "*condition sine quanon*". Meskipun demikian secara yuridis suatu partai politik dapat dibubarkan jika ideologinya bertentangan dengan ideologi negara dan melanggar hukum.

Secara normatif pelaksanaan Pembubaran Partai Politik menjadi Kewenangan Mahkamah Konsitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni "Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Pembubaran Partai Politik " Selanjutnya Pembubaran suatu Partai politik oleh Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada alasanalas an yuridis yakni melanggar larangan-larangan seperti salah

satunya yang ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.⁶⁰

Menurut Pasal 40 ayat (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang atau tanda gambar yang sama dengan:

- a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. Nama, Bendera, lambang negara lain atau lembaga/ badan internasional;
- d. Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. Nama atau gambar seseorang; atau
- f. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Partai Politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- a) Diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan dilengkapi dengan PMK Nomor : 04/PMK/2004 dan PMK Nomor : 05/ PMK/2004.
- b) Pemohonnya adalah perorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah, partai politik peserta pemilu, dan Pasangan calon presiden/calon

⁶⁰Abdul Rasyid Thalib, "Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.432- 433.

wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden, sedangkan termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum.

c) Obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam rangka menciptakan sistem politik yang demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dibentuk institusi kehakiman yang dapat menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan institusi kehakiman dimaksudkan agar kekuasaan negara dapat dibatasi karena jika kekuasaan negara tidak dibatasi maka kekuasaan negara menjadi absolut.⁶¹

Hal ini senada dengan ungkapan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup (*power tends to corrupt*) dan kekuasaan mutlak menjadi korup secara mutlak pula.⁶² Oleh karena itu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur mengenai kekuasaan kehakiman yakni:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

⁶¹Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Pembaharuan Islam*, Vol. II, No. 2, (Mei-Agustus 2015), h. 264-267

⁶²Lutfi Widagdo, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, (Juni 2010), h. 13

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pembentukan institusi tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi, sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyalahi konstitusi. Selain itu mengingat bahwa sistem hukum RI yang *civil law* maka negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi.

Berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi mengandung makna antara lain; pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, dan kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil (*individual rights*), hak-hak politis (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan baik secara pribadi atau kelompok⁶³

Berbeda dengan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dimana akses terhadap mahkamah konstitusi

⁶³Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. (Yogyakarta: Total Media. 2009), h. 99

tampaknya agak luas maka yang memiliki *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-undang mahkamah konstitusi hanya pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut adalah pemerintah pusat.

Pasal 68 ayat (2) Undang-undang mahkamah kontitusi mewajibkan pemerintah sebagai pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Ideologi
- b. Asas
- c. Tujuan
- d. Program
- e. Kegiatan partai politik

Yang semuanya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 merupakan alasan partai politik tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi mengenai pembubaran partai politik, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran partai pada pemerintah.

Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik (Undang-undang partai politik) dalam Bab XI Pasal 20 juga menyebutkan bahwa salah satu cara bubarnya partai politik, yaitu apabila dibubarkan oleh mahkamah konstitusi.⁶⁴ Akan tetapi, terdapat inkonsistensi tentang alasan pembubaran yang dimuat dalam Undang-undang mahkamah konstitusi dengan yang di atur dalam Undang-undang partai politik. Bab VIII Undang-Undang partai politik yang mengatur peradilan perkara partai politik, pada

⁶⁴UU No.31 Tahun 2002

Pasal 16 menentukan bahwa perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan Undang-undang ini di ajukan melalui Pengadilan Negeri (PN) yang hanya dapat di ajukan upaya hukum kasasi.

Sebelumnya dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik (Undang-undang partai politik lama) mengatur bahwa pembubaran politik dilakukan oleh mahkamah agung. Pasal 17 ayat (2) Undang-undang mengatur sebagai berikut:

Dengan Kewenangan yang ada padanya, mahkamah agung republik Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16 Undang-undang ini.

Alasan untuk membekukan partai politik, yaitu menghentikan kepengurusan dan/atau kegiatan partai politik sama dengan alasan untuk membubarkannya. Sebelum tindakan membekukan atau membubarkan dilakukan melalui kewenangan mahkamah agung, partai politik yang bersangkutan harus terlebih dahulu di dengar melalui persidangan di Mahkamah Agung. Dalam praktik yang pernah terjadi di Mahkamah Agung, gugatan pembubaran partai politik pada saat itu diajukan oleh partai yang justru menjadi saingan partai politik yang dimohon di bubarkan dan bukan diajukan oleh pemerintah sebagaimana menjadi aturan hukum yang dianut sekarang dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Partai politik sebagai badan hukum tentu sudah melakukan berbagai hubungan hukum atau tindakan hukum dengan berbagai pihak.

Dengan adanya hubungan hukum atau tindakan hukum dengan berbagai pihak maka timbul akibat hukum yaitu lahirnya hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Secara hukum tetap dijamin hak-hak dan kewajiban partai politik, pemerintah tidak boleh membubarkan suatu partai politik, artinya, keberadaan mahkamah konstitusi adalah untuk menjamin sekaligus melindungi partai politik dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang membubarkan partai politik tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum.

Apabila suatu partai politik dibubarkan, maka akan berpengaruh pada hak dan kewajiban serta kekayaan yang telah didapat dan jabatan-jabatan yang telah dihasilkan selama hubungan hukum atau tindakan hukum itu berlangsung. Pengaturan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan karena pembubaran suatu partai politik pada masa Orde Lama atau sebelum Reformasi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

“Sebagai akibat pembubaran/pelanggaran sesuatu partai politik, seorang anggota dari partai itu yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut”

Sedangkan pada masa setelah Reformasi, ketentuan akibat hukum pembubaran partai politik di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2).

Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan negara hukum (*rechtstaat, constitutionalism*).

Salah satu prasyaratnya, di selenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil. pilar utama dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Tentu saja, ada syaratnya, pemilu dimaksud harus berpijak serta berpucuk secara jujur dan adil pada “daulat rakyat”. Kini, sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini menggunakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling “aman”.⁶⁵

Dalam konstruksi berpikir hukum, UUD Negara RI Tahun 1945 adalah meta norm yang menjadi pijakan semua nilai (*values*) yang dicita-citakan dari suatu negara hukum, termasuk dalam hal ini prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Itu sebabnya, di dalam konteks pelaksanaan Pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam 7 Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat merepresentasikan secara *genuine* “daulat rakyat.

⁶⁵PUTUSAN Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, h. 10

Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia. Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945.

Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan Konstitusional bangsa yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum. Oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini, sekali lagi, keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembangan amanah publik. Bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri. Pada konteks Indonesia, Pemilu 1955 senantiasa dijadikan referensi sebagai suatu pemilu yang paling demokratis.

Daulat rakyat dimuliakan dan adanya kesadaran yang tinggi untuk berkompetisi secara sehat. Kala itu, tidak akan ada yang menyangka, meski yang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak sekalipun menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya untuk “memaksa” siapapun yang berada di bawah kendali kekuasaannya agar “berpihak” hanya untuk kepentingan sang penguasa.

Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan prasyarat di atas. Pasal dimaksud menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Syarat adanya kejujuran (*honesty*) dan keadilan (*justice*) merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia. UUD Negara RI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai “kesepakatan suci” yang tidak boleh diingkari. Itulah sebabnya, konstitusi diibaratkan sebagai “*a ticket for entry to a civilized nation*”.

Konstitusi juga merupakan semacam “surat kuasa” (*the Power of Attorney*) yang diberikan oleh rakyat kepada negara dimana terdapat pertanggung jawaban Konstitusional Negara. Pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi adalah *scope of work* dari negara karena segala organ negara harus menjalankan kewajiban secara imperatif.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menetapkan sebagai berikut. “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”⁶⁶ Perselisihan ini menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih baik sebagai anggota DPD, DPR maupun DPRD atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan wakil Presiden melangkah ke putaran berikut (putaran kedua) pemilihan Presiden dan wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden dan wakil Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak.

Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilu mengajukan dua hal pokok, yaitu:

- (1) adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan
- (2) hasil perhitungan yang benar didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidak benaran perhitungan KPU.

Berdasarkan hal tersebut pemohon meminta agar mahkamah konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU dan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon (Pasal 75 Undang-undang mahkamah konstitusi).

Yang menjadi perhatian adalah, meskipun penghitungan suara yang diajukan oleh pemohon benar dan hasil penghitungan suara KPU salah,

⁶⁶Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

hal itu tidak mempengaruhi terpilihnya anggota DPD, perolehan kursi DPR/DPRD, dan langkah calon Presiden/wakil Presiden ke putaran kedua pemilu Presiden/wakil Presiden, permohonan demikian akan tetap dinyatakan tidak dapat diterima. Penghitungan suara yang mempengaruhi tersebut haruslah mengakibatkan perubahan peringkat perolehan suara.

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.⁶⁷

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem Ketatanegaraan berdasarkan norma-

⁶⁷Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangundangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 26

norma, aturan-aturan Konstitusi, serta prinsip-prinsip Konstitusionalisme dan Negara Hukum dalam suatu Konstitusi.⁶⁸

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).



⁶⁸Nanang Sri Darmadi, “ Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2(Mei-Agustus 2015), h. 24

BAB IV

LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Lembaga Mahkamah Konstitusi

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer fiqh siyasah sering kali disebut sebagai ilmu Tata Negara, dalam hal ini berada pada konsep Negara Islam.

Perihal konstitusi ini ternyata telah ada di dalam Islam jauh sebelum mahkamah konstitusi diperkenalkan pertama kali di Australia pada sekitar tahun 1919. Ide Konstitusi tersebut ada di dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga baru Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, disamping Mahkamah Agung.

Meskipun ide konstitusi itu telah ada dalam Islam sejak masa Rasulullah, namun lembaga konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Meskipun demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat diterima dalam Islam. Jika ia memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam syariat yakni :

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Transparansi
3. Prinsip Partisipasi
4. Prinsip Penegakan Hukum
5. Prinsip Kebaikan Masyarakat (Masalah Mursalah)

Proses pembentukan mursalah sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Jadi dalam Syari'at Islam harus ada prinsip yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dua pilar itu merupakan kekuatan masyarakat Islam dan Agama Islam, satu cara hidup dan tatanan sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan.

Namun adanya fleksibilitas dalam Syari'at Islam harus senantiasa *up to date* dan mereduksi perkembangan kehidupan umat.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu

Hukum Tata Negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau kedudukan Mahkamah Konstitusi menggunakan tinjauan fiqh siyasah (ilmu tata negara dalam konsep negara Islam).

Qadhaiyyah atau peradilannya yang mesti diisi oleh Qadhi yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan Peradilan yang baik dan sesuai tuntutan Islam ini sangat relevan untuk diterapkan di negara manapun dan di negara yang berideologi apapun karena banyak sekali kemaslahatan yang dijunjung tinggi oleh keberadaan peradilan Islam itu sendiri.

B. Wewenang Kelembagaan

Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menegaskan hukum dan keadilan dalam lingkup Wewenang yang dimiliki.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang, Sebagaimana Damanatkan Oleh Undang-Undang 1945, Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang adalah pengujian mengenai nilai Konstitusionalitas Undang-Undang itu, baik dari segi formil ataupun materil. Oleh karena itu pada tingkat pertama, pengujian Konstitusionalitas

itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Konstitusionalitas sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian Konstitusionalitas. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang saja, bukan peraturan lain yang tingkatanya berada dibawah Undang-Undang.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵. Hal ini menjadi ketetapan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan yang berada di dalam suatu negara dan dibuat dengan tujuan untuk membantu membangun negara. Ruang lingkup peraturan nya antara lain mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan Kewenangan nya sesuai dengan kode etik dan pedoman prilaku hakim, serta meningkatkan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/ interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu proses di dalam menegakkan Negara Hukum dan demokrasi sehingga untuk menciptakan hal yang demikian, setiap putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan di realisasikan dengan sebaik-baiknya.

2. Menurut pandangan Hukum Islam bahwa Mahkamah konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam tetapi keberadaanya di bolehkan atas dasar prinsip:

- a. Masalah Mursalah adalah masalah yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembutian atau penolakannya.
- b. Qaidah ushul mengatakan: *الأصل في الأشياء إلا بآ حة* (asal dari segala sesuatu adalah boleh)

Demi kemaslahatan yang besar tersebut, maka penulis berpendapat selayaknya maka diperbolehkan dan dapat diterima Mahkamah Konstitusi diberikan Wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap UUD 1945.

B. Saran

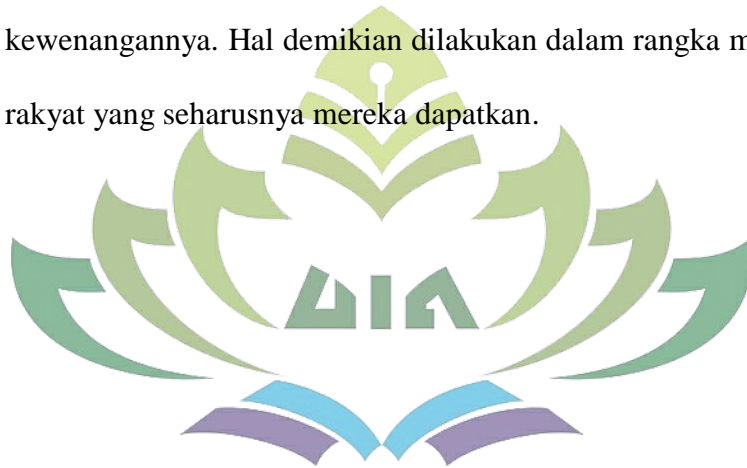
Dari hasil kesimpulan di atas peneliti sudah melakukan analisis data pada penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Presfektif Hukum Islam, Maka saran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait:

1. Melihat pentingnya lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 di perlukan peraturan yang jelas dan baik melalui amandemen ulang maupun peraturan yang siftnya mengatur tata cara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Dalam membuat Undang-Undang pemerintah dan DPR di harapkan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, agar Penguasa atau pejabat negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya melalui

kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki ini termasuk dalam pembuatan kebijakan ataupun pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sangat mungkin kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat mengandung unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.

2. Dibutuhkan lembaga yang juga memiliki kekuatan yang seimbang dengan penguasa atau pejabat negara untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara melalui kewenangannya. Hal demikian dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak rakyat yang seharusnya mereka dapatkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cet. I .Jakarta, Konstitusi Pers 2005.
- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abu Daud Busro. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al- Hikmah, Al Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010.
- Estiko Didit Hariadi dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003.
- Fatkhurohman Dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harahap, Zairin , *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- H. Salim dan Nurbaidi ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hasan Mu'arif Ambary, "Muhtasib", *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay S.H. *Mahkamah Konstitusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, April 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke II, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke 11, 2010.

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Roska Karya, Bandung, 2000

LNRI Tahun 2003 No. 98 dan Tambahan LNRI No.4316.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pernadamedia Group, 2016.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012.

MD Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Islam*, Jakarta: Indo Hill Co, 1985.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.

R. Tresno, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta: W. Versluys, 1957.

Sutiyoso Bambang, Desember 2010, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta, 1997.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Grafik Grafika, Jakarta, Cetakan Ke 3, 2011.

B. Jurnal

Ali Marwan Hsb, *Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (The Review Of The Government Regulation In Lieu Of Law)*, Jurnal legislasi, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016.

Darmadi Nanang Sri, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum 2015.

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Ismail Ramadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, Jurnal Rechts Viding, Vol 6, No 1, April 2017.

Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 63 (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (23 Maret 2019, pukul 20:30 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. Undang-Undang

Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d 24/2003, Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Tentang Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 22E Tentang Pemilihan Umum.

D. Sumber Online

Tempo.co, “Mahkamah Konstitusi Berhak Uji Semua Undang-Undang”. (On-line), tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/59519/mahkamah-konstitusi-berhak-uji-semua-undang-undang>, (13 April 2005).

Dimas Hutomo, “Dapatkah Menguji Kembali Materi Muatan Pasal yang sama ke Mahkamah Konstitusi”. (On-line),

tersedia di: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5c4fc2369ddc/dapatkah-menguji-kembali-materi-muatan-pasal-yang-sama-ke-mk/> (30 Januari 2019).

Glery Lazuardi, “Mahkamah Konstitusi Kembali Sidangkan Perkara Pengujian Undang-Undang”. (On-line),

Tersedia: <https://www.google.co.id/amp/s/.m.tribunnews.com/amp/nasional/.2019/09/03/mk-kembali-sidangkan-perkara-pengujian-undang-undang>, (3 september 2019)

